

**LAPORAN PENELITIAN**

# **KAJIAN POTENSI INVESTASI DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020**



**KERJASAMA**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG)  
KABUPATEN TAPIN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM) ULM  
BANJARMASIN**

# **LAPORAN PENELITIAN**

---

## **KAJIAN POTENSI INVESTASI DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020**

---

### **TIM PENELITIAN**

**Ketua/Koord. Tim Peneliti** : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si

**Anggota Peneliti** : M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si  
Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA  
Doni Stiadi, S.Si., M.Si., CRA  
Dr. Nuril Huda, SE., MM

**Peneliti Pembantu** : Dr. Siswanto Rawali, S.Sos., M.Si  
Ismar Hamid, S.S., M.Si

## LEMBAR PENGESAHAN

- 
1. Judul Penelitian : **Kajian Potensi Investasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020**
2. Lokasi : Kabupaten Tapin
3. Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
4. Ketua Peneliti
- a. Nama : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si
  - b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Guru Besar/Pembina Utama Muda/IVc
  - c. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin  
Telp. (0511) 3302789
5. Anggota Peneliti : 1. M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si  
2. Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA  
3. Doni Stiadi, S.Si., M.Si  
4. Dr. Nuril Huda, SE., M.Si  
5. Dr. Siswanto Rawali, M.Si  
6. Ismar Hamid, M.Si
6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
7. Sumber Dana : DIPA Anggaran Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2020
- 

Mengetahui/Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat ULM



Banjarmasin, November 2020  
Ketua Peneliti

**Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si**  
NIP. 19671231 199512 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga Tim Peneliti dapat menyusun Laporan Kajian Potensi Investasi Daerah Kabupaten Tapin tahun 2020. Terwujudnya kegiatan kajian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah kabupaten Tapin terutama Bappelitbang Kabupaten Tapin, demikian pula halnya dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, serta Instansi terkait di Kabupaten Tapin.

Berkenaan dengan hal tersebut, selayaknyalah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapin, Bapak Kepala Bappelitbang, Sekretaris Bappelitbang Kabupaten Tapin beserta seluruh jajarannya. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua LPPM ULM, yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan kajian ini. Semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menaruh harapan besar agar kiranya kegiatan kajian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Banjarmasin, Desember 2020

Tim Peneliti



## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER TIM PENELITI .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran .....	4
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan.....	5
1.5. Output Kegiatan .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Teori Investasi.....	6
2.2. Pendekatan Investasi .....	7
2.3. Jenis-Jenis Investas.....	10
2.4. Sumber Investasi .....	11
2.5. Bidang Usaha Untuk Investasi .....	13
2.6. Tujuan Investasi .....	14
2.7. Peranan Investasi Dalam Pembangunan.....	14
2.8. Teori Pemerintahan Dalam Investasi .....	15
2.9. Hubungan Investasi dengan Perekonomian Daerah.....	16
2.10. Teori-teori investasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah.....	18
2.11. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Investasi .....	18
2.12. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi .....	19
2.13. Peningkatan Iklim Investasi di Daerah.....	21
2.14. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Investas .....	21
2.15. Pengertian <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) .....	23
2.16. Pengertian Kapital (Modal) dan Investasi.....	24
2.17. Konsep Kapital (Modal) dan Investasi dalam ICOR .....	25
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1. Desain Penelitian dan Kerangka Penelitian .....	28
3.1.1. Desain Penelitian .....	28
3.1.2. Kerangka Penelitian .....	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.3. Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data .....	29
3.4. Teknik Analisis Data .....	30
3.5. Jangka Waktu Penelitian .....	31
3.6. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian .....	31
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1. Deskripsi Umum Wilayah .....	33
4.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah.....	33
4.1.2. Kondisi Fisik dan Geografis .....	35
4.1.3. Kependudukan dan Kondisi Sosial.....	39

4.1.4. Kondisi Perekonomian .....	42
4.2. Pola Ruang Dan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Tapin .....	46
4.2.1. Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapin .....	46
4.2.2. Kawasan Strategis Kabupaten Tapin .....	60
4.3. Kebutuhan Investasi Kabupaten Tapin .....	67
4.3.1. Analisa ICOR Kabupaten Tapin .....	67
4.3.2. Estimasi Kebutuhan Investasi Kabupaten Tapin .....	74
4.3.3. Sektor Prioritas Investasi Kabupaten Tapin .....	75
4.4. Isu Pokok Investasi Daerah .....	76
4.5. Potensi Dan Peluang Investasi .....	77
4.5.1. Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian .....	77
4.5.2. Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perkebunan .....	83
4.5.3. Potensi dan Peluang Investasi pengembangan UMKM .....	87
4.5.4. Potensi Investasi Sektor Pariwisata .....	116
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
5.1. Kesimpulan .....	128
5.2. Rekomendasi Kebijakan .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR 1.1.	Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2015-2019	2
GAMBAR 2.1.	Rancangan rencana Investasi Kabupaten Tapin	8
GAMBAR 2.2.	Bentuk kerjasama Pemerintah-Swasta (Kemitraan	10
GAMBAR 2.3.	Sinergitas Lingkungan Luas dan langsung bagi peningkatan Investasi Daerah	19
GAMBAR 3.1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	29
GAMBAR 4.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin	33
GAMBAR 4.2	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	35
GAMBAR 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin 2015-2019 (%)	40
GAMBAR 4.4	Distribusi PDRB Kabupaten Tapin (%)	43
GAMBAR 4.5	Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Tapin tahun 2019 (%)	44
GAMBAR 4.6	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapin	46
GAMBAR 4.7	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapin	60
GAMBAR 4.8	Kawasan Strategis Rantau Baru Kabupaten Tapin	61
GAMBAR 4.9	Kawasan Strategis Kota Margasari baru	62
GAMBAR 4.10	Kawasan Strategis Binuang Baru	62
GAMBAR 4.11	Kawasan Strategis Pelabuhan Khusus Batubara	63
GAMBAR 4.12	Kawasan Strategis Benua Halat-Sosial Budaya	66
GAMBAR 4.13	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Riil Kabupaten Tapin 2015-2019	68
GAMBAR 4.14	Distribusi PDRB Riil Menurut Pengeluaran Kabupaten Tapin 2015-2019	68
GAMBAR 4.15	Pertumbuhan nilai Investasi berdasarkan harga berlaku dan konstan tahun 2010 Kabupaten Tapin tahun 2015-2019	71
GAMBAR 4.16	Rasio Nilai Investasi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%) Kabupaten Tapin Tahun 2015-2019	71
GAMBAR 4.17	Pertumbuhan ekonomi, investasi dan investasi PMTB Kabupaten Tapin 2015-2019	72
GAMBAR 4.18	Pengrajin Anyaman Purun	89
GAMBAR 4.19	Kopiah/Peci Dari Jangang	93
GAMBAR 4.20	Kegiatan Kerajinan Tangan Rotan Masyarakat Kabupaten Tapin	96
GAMBAR 4.21	Produk kerajinan tangan kaolin dalam bentuk souvenir keramik	100
GAMBAR 4.22	Salah satu produk olahan cabai Hiyung yang telah mendunia	103
GAMBAR 4.23	Produk Industri rumah tangga olahan Pisang Binuang (Pisang Rimpi)	105
GAMBAR 4.24	Hasil Panen Ikan Gabus/Haruan di Desa Pabaungan Pantai	107
GAMBAR 4.25	Produk UMKM Jagung Marning	110
GAMBAR 4.26	Produk Sasirangan Kabupaten Tapin	112
GAMBAR 4.27	Potensi Wisata Alam Goa Batu Hapu	119
GAMBAR 4.28	Potensi Wisata Alam Air Terjun Hangui	119
GAMBAR 4.29	Potensi Wisata Alam Danau Hatiwin	120
GAMBAR 4.30	Potensi Wisata Alam Bukit Buluan	120
GAMBAR 4.31	Potensi Wisata Kota alun-alun Basimban	121
GAMBAR 4.32	Potensi Wisata Kota Taman 17 Mei	121
GAMBAR 4.33	Potensi Wisata Agro Bendungan Tapin	122
GAMBAR 4.34	Potensi Wisata Agro Madu Kelulut, Kecamatan Lokpaikat	122
GAMBAR 4.35	Potensi Wisata Budaya Maayun Anak/Maulid	123
GAMBAR 4.36	Potensi Wisata Budaya Situs Candi Laras	124
GAMBAR 4.37	Potensi Wisata Budaya Rumah Aat Gajah Manyusu	124

GAMBAR 4.38	Potensi Wisata Religi/Ziarah Makam Datu Sanggul	125
GAMBAR 4.39	Potensi Wisata Religi/Ziarah Makam Datu Nuraya	126
GAMBAR 4.40	Potensi Wisata Religi/Ziarah Masjid Keramat Banua Halat (Masjid Al-Mukkaramah)	126
GAMBAR 4.41	Potensi Wisata Religi/Ziarah Makam Wali M. Noor	126



## DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tapin	34
TABEL 4.2	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian dari permukaan Laut di Kabupaten Tapin	36
TABEL 4.3	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin	36
TABEL 4.4	Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan penduduk, Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin 2019	39
TABEL 4.5	Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tapin Tahun 2019	41
TABEL 4.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tapin Tahun 2019	41
TABEL 4.7	PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2015-2019	45
TABEL 4.8	Pertumbuhan Komponen PDRB Riil menurut Pengeluaran Kabupaten tapin 2015-2019	69
TABEL 4.9	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Tapin 2015-2019	70
TABEL 4.10	Koefisien ICOR Kabupaten Tapin Tahun 2015-2019	73
TABEL 4.11	Kebutuhan Investasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin 2020-2023	74
TABEL 4.12	Sektor Basis dan Unggulan pada Sektor Primer Kabupaten Tapin 2012-2019	76
TABEL 4.13	Pembentukan PDRB Kabupaten Tapin Berdasarkan Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2015-2019	78
TABEL 4.14	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2019	79
TABEL 4.15	Luas Lahan Sawah, Lahan bukan Sawah dan Lahan bukan Pertanian di Kabupaten Tapin	80
TABEL 4.16	Jenis Lahan Sawah di Kabupaten Tapin	81
TABEL 4.17	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ton) di Kabupaten Tapin, 2018 dan 2019	83
TABEL 4.18	Kontribusi PDRB pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tapin	84
TABEL 4.19	Luas lahan (Ha) Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet di Kabupaten Tapin Tahun 2019	84
TABEL 4.20	Hasil Produksi (Ton) Karet di Kabupaten Tapin Tahun 2019	85
TABEL 4.21	Kunjungan wisata di kabupaten tapin	116
TABEL 4.22	Fasilitas pendukung Pariwisata Kabupaten Tapin 2029	117
TABEL 4.23	Potensi Obyek Wisata Alam Kabupaten Tapin	119
TABEL 4.24	Potensi Obyek Wisata Kota dan Agro Kabupaten Tapin	121
TABEL 4.25	Potensi Pariwisata budaya daerah Kabupaten Tapin	123
TABEL 4.26	Potensi Pariwisata Religi/ziarah Kabupaten Tapin	125

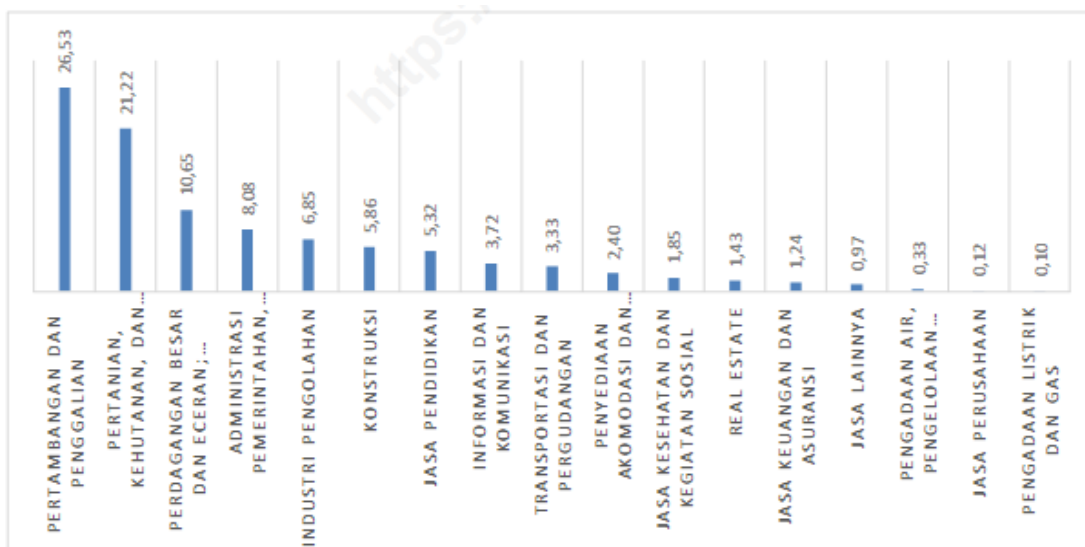
## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mendeskripsikan bahwa setiap Pemerintah Daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk mampu membiayai berbagai pembangunan daerahnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap daerah diharuskan untuk memiliki kemampuan dalam upaya mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Pada konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya dan juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Tapin adalah salah satu dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 2.174,95 km<sup>2</sup>, yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

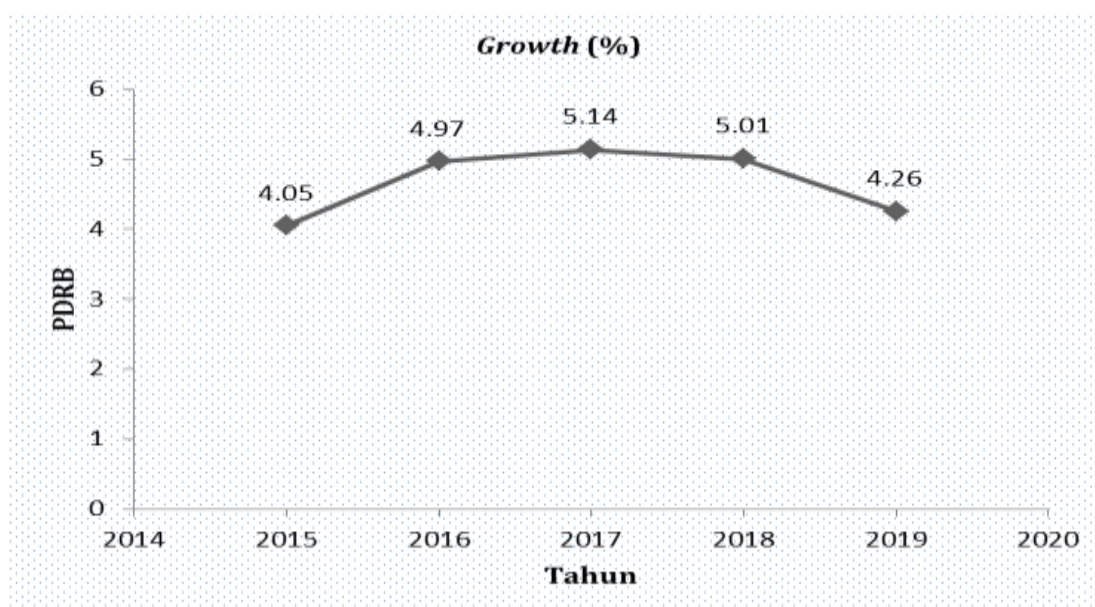
Aktivitas ekonomi Kabupaten Tapin dapat digambarkan dari struktur perekonomiannya. Struktur ekonomi ini diperlukan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah baik perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD), maupun perencanaan jangka pendek yang diwujudkan pada program kerja tahunan. Struktur ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,61%. Kecamatan penghasil sektor pertambangan dan penggalian antara lain kecamatan Binuang, Hatungun, Salam Babaris, Tapin Selatan, Bungur, dan Lokpaikat. Berikut ini adalah garfik struktur ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2019.



Sumber: PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

**Gambar A.** Distribusi PDRB Kabupaten Tapin (%)

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama 2015-2019 secara rata-rata tumbuh sebesar 4.69. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama 2015-2019.



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020 (diolah)

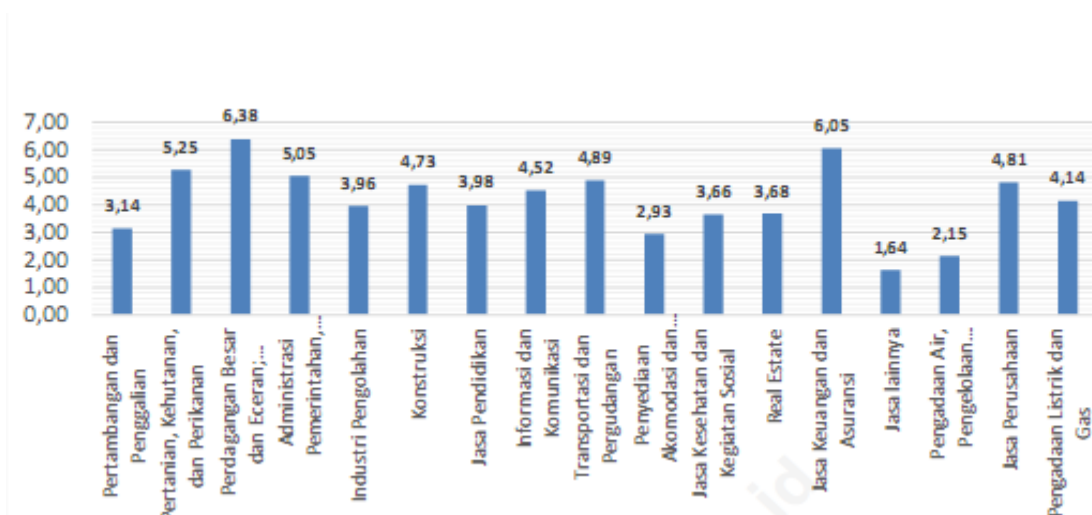
**Gambar B.** Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2015-2019

Pada teori ekonomi pembangunan, diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak *input* ke dalam proses produksi. Oleh karena itu memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintahan. Investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang terarah. Dimana investasi tersebut terkoordinasi dan terencana dengan memperhatikan hubungan antar wilayah, lokasi industri, pembangunan infrastruktur, sehingga tidak terjadi benturan dalam implementasi.

Penentuan potensi ekonomi yang dimiliki pada suatu negara ataupun daerah perlu diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis ataupun unggulan yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menganalisis peluang dan potensi investasi pada suatu daerah antara lain: (a) mengidentifikasi sektor unggulan dan potensi ekonomi pada suatu daerah; (b) mengkaji kelayakan sektor unggulan; (c) menyusun peluang investasi sektor unggulan; dan (d) mensinergikan peluang investasi dan kebijakan daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan investasi yang tepat pada sektor potensial adalah potensi sumber daya alam, dimana potensi sumber daya alam dapat sangat menunjang pengembangan daerah tertentu, misalnya potensi pada sektor pertanian, pariwisata, pertambangan, industri atau jasa. Sebagai daerah yang berkembang Kabupaten Tapin akan memerlukan investasi yang berfungsi untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian yang mendasarkan pada identifikasi pertanyaan-pertanyaan pokok seperti: (1) bagaimana kondisi lapangan usaha, komoditi strategis dan SDA daerah di Kabupaten Tapin; (2) bagaimana kesiapan Kabupaten Tapin dan secara khusus aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menarik investasi; dan (3) bagaimana kondisi faktor pendorong dan hambatan dalam berinvestasi di Kabupaten Tapin

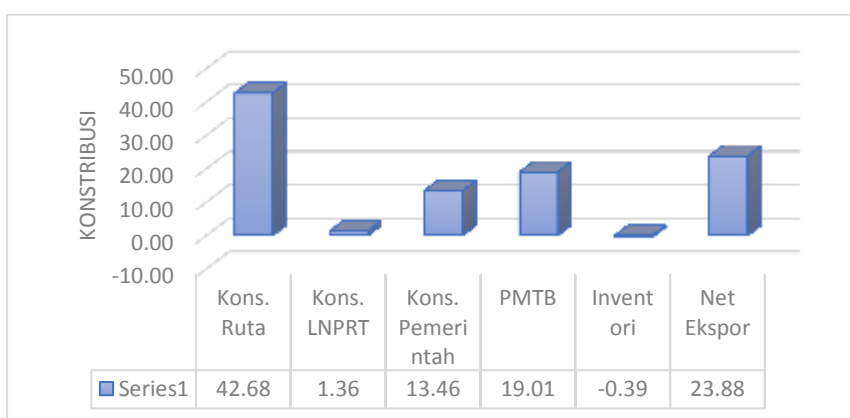
Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 6,38%, pertumbuhan tertinggi kedua adalah pada sektor lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang pertumbuhannya mencapai 6,05%. Sedangkan subsektor pertambangan batu bara dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian tumbuh melambat. Potret tersebut tergambar dari pertumbuhan sektor ini, yang mana pada periode 2017-2018 pertumbuhan sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih diatas 5%, sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhannya hanya 3,14% hal ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin menjadi 4,26% yang mana pada tahun sebelumnya masih mencapai 5,01%. Berikut ini adalah garfik pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha Kabupaten Tapin Tahun 2019.



Sumber: PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

**Gambar C.** Pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha Kab. Tapin tahun 2019 (%)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah secara riil. Laju pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi ditinjau dari sisi pengeluaran, sebagian besar PDRB kabupaten Tapin digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Pada periode 2015-2019, rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga per tahun sebesar 42,68 persen dari total PDRB. Komponen terbesar kedua adalah *net export* dengan *share* mencapai rata-rata sebesar 23,88 persen. Angka Positif *net export* menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir Kabupaten Tapin mengalami *surplus* neraca perdagangan.



Sumber: PDRB Kabupaten Tapin Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019

**Gambar D.** Distribusi PDRB Riil Menurut Pengeluaran Kabupaten Tapin 2015-2019 (%)

Pada kurun waktu 2015-2019, hampir semua komponen pengeluaran di Kabupaten Tapin tumbuh positif kecuali pada komponen perubahan inventori yang tumbuh negatif hingga mencapai minus 292,16 persen. Pertumbuhan paling tinggi ada pada komponen *net exsport*



yang tumbuh rata-rata 7 persen, disusul konsumsi LNRT 6,68 persen dan PMTB rata-rata tumbuh 4,91 persen.

**Tabel A.** Pertumbuhan Komponen PDRB Riil menurut Pengeluaran Kab.Tapin 2015-2019

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Konsumsi Rupa	4,66	4,60	4,82	4,30	4,34	4,54
Konsumsi LNRT	7,54	4,66	5,81	7,37	8,02	6,68
Konsumsi Pemerintah	5,26	0,04	0,79	1,16	1,48	1,75
PMTB	5,38	3,17	4,28	6,66	5,07	4,91
Inventori	-36,90	-1.056,85	-93,55	-254,87	-18,62	-292,16
Net Export	1,54	24,10	-0,97	5,35	4,97	7,00
<b>PDRB</b>	<b>4,05</b>	<b>4,97</b>	<b>5,14</b>	<b>5,01</b>	<b>4,26</b>	<b>4,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, diolah (2020)

PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi *output* setengah jadi, atau *input* yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2010 sebagaimana Tabel B. Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Tapin selama periode 2015–2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai investasi atas dasar harga berlaku sebesar 1,39 triliun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1,90 triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp. 1,04 triliun, kemudian terus meningkat menjadi Rp.1,25 triliun pada tahun 2019, meskipun sempat turun pada tahun 2016. Baik Berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2010, komponen penyumbang terbesar Investasi berasal dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

**Tabel B.** Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Tapin 2015-2019 (Rp. Milyar)

Tahun	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	PMTB	Inventori	Jumlah	PMTB	Inventori	Jumlah
2015	1.372.476,17	17.322,38	1.389.798,55	1.027.035,44	14.562,44	1.041.597,88
2016	1.448.166,19	-166.752,08	1.281.414,11	1.059.635,77	-139.340,81	920.294,96
2017	1.539.421,40	-11.484,65	1.527.936,75	1.104.996,78	-8.991,82	1.096.004,96
2018*	1.699.308,97	18.272,22	1.717.581,19	1.178.569,51	13.925,95	1.192.495,46
2019**	1.876.870,22	25.732,64	1.902.602,86	1.238.336,02	11.332,42	1.249.668,44

Sumber : BPS Kabupaten Tapin, diolah (2020)

\*angka sementara \*\*angka sangat sementara

Investasi merupakan syarat perlu untuk mendorong terjadinya aktivitas ekonomi, hal ini diungkapkan dalam teori *Cobb Douglas* maupun *Harold Domar*. Ide utama pendapat

mereka adalah besarnya *output* dalam proses produksi akan proporsional dengan besarnya modal (*capital*). Identifikasi atas potensi investasi daerah secara lebih rinci dalam bentuk sektor-sektor yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih dahulu harus dipahami jenis-jenis sektor tersebut. Menurut teori ekonomi basis (Edwards, 2007), ada dua jenis sektor yaitu sektor basis yang memproduksi barang atau jasa sehingga dapat diekspor ke luar daerah dan subsektor bukan basis yang memproduksi barang atau jasa untuk konsumsi lokal. Menurut asumsi teori ekonomi basis penambahan ekspor ke luar daerah tidak hanya akan mendorong pekerjaan dan pendapatan dalam subsektor basis tetapi juga permintaan untuk barang dan jasa yang bukan basis. Untuk mengidentifikasi subsektor basis tersebut bisa dilakukan dengan mengestimasi rasio *location quotient* (LQ).

Menggunakan data-data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin dan Produk Domestik Bruto Kalimantan Selatan dari tahun 2012 sampai dengan 2019, sebagai karakteristik daerah dan provinsi sebagai acuan, maka analisis-analisis LQ dilakukan untuk masing-masing sektor yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier potensi investasi Kabupaten Tapin. Hasil analisis LQ ditampilkan secara ringkas pada Tabel berikut ini.

**Tabel C.** Sektor Basis dan Unggulan pada Sektor Primer Kabupaten Tapin 2012-2019

No	Sektor	LQ	Kategori
<b>PRIMER</b>			
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,39	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	1,28	BASIS
<b>SEKUNDER</b>			
C	Industri Pengolahan	0,50	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	NON BASIS
E	Pengadaan Air	0,78	NON BASIS
F	Konstruksi	0,70	NON BASIS
<b>TERSIER</b>			
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	0,98	NON BASIS
H	Transportasi dan pergudangan	0,52	NON BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,05	BASIS
K	Jasa Keuangan	0,31	NON BASIS
L	Real Estate	0,63	NON BASIS
M	Jasa Perusahaan	0,18	NON BASIS
N	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,25	BASIS
O	Jasa Pendidikan	1,10	BASIS
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	NON BASIS
Q	Jasa lainnya	0,76	NON BASIS

Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan identifikasi potensi investasi daerah melalui analisis LQ, diperoleh hasil bahwa: (a) sektor primer, dan sektor tersier merupakan sektor basis, sehingga pemerintah Kabupaten Tapin dapat mempertimbangkan prioritas investasi pada kedua sektor ini. Sektor primer (A) pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor primer (B), pertambangan dan penggalian, keduanya merupakan sektor basis. Sedangkan sektor tersier, sektor yang layak untuk lebih dikembangkan dan menjadi prioritas investasi pemerintah daerah Kabupaten Tapin terdiri dari sektor (I) penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor (J) informasi dan

komunikasi, sektor (N) administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, serta sektor (O) Jasa Pendidikan.

Pada sektor sekunder, dua sektor yang perlu dipertimbangkan sebagai sektor strategis karena terkait ketahanan daerah, atau terkait langsung sebagai nilai tambah dan pendukung terhadap sektor basis yaitu sektor konstruksi, dan sektor Industri Pengolahan. Sektor ini terutama membantu dalam membangun infrastruktur dan nilai tambah (*hilirisasi industry*) sektor primer yang diperlukan untuk pembangunan daerah.

Untuk mendorong masuknya investasi dari luar, di Kabupaten Tapin diperlukan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, perlu dipacu jiwa *entrepreneurship* dari masyarakat Kabupaten Tapin sehingga berani melakukan investasi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Investasi membutuhkan iklim yang kondusif dan transparansi dalam hal legalitas pelayanan dan prosedur investasi. Daerah harus mampu membuat *business planning map* tentang peluang investasi daerahnya berdasarkan *feasibility-study* yang matang. Perlu dibentuk kawasan-kawasan investasi berdasarkan peruntukannya. Selain itu, juga diperlukan pembenahan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Adapun potensi-potensi Investasi di Kabupaten Tapin hasil analisis kajian ini antara lain:

- a. Pertanian berada di seluruh kecamatan dengan komoditas utama tanaman pangan Padi, dan jagung, tanaman hortikultura berada pada kecamatan Tapin Tengah dengan produksi tanaman cabai hiyung, dan Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, serta kecamatan Binuang untuk produksi bawang merah.
- b. Perkebunan antara lain perkebunan Kelapa sawit berada di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara; Perkebunan Karet hampir di semua Kecamatan Kabupaten Tapin kecuali kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, dan Perkebunan Kelapa berada di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapin.
- c. Potensi UMKM anyaman purun di Kecamatan Candi Laras Selatan masing-masing berada di Desa Margasari Hulu, Desa Candi Laras dan Desa Sungai Rutas. Potensi UMKM olahan cabai rawit hiyung di Kecamatan Tapin Tengah beada di Desa Hiyung, dan Potensi olahan Pisang Binuang di Kecamatan Binuang.
- d. Potensi Pariwisata berada hampir di semua Kecamatan Kabupaten Tapin yang terdiri dari wisata alam, wisata kota dan argo, wisata budaya daerah, dan wisata religius. Wisata budaya dan religius/ziarah dapat dijadikan prioritas untuk pengembangan investasi di Kabupaten Tapin karena wisata ini yang paling dominan di kunjungi wisatawan dalam lima tahun terakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Domar, E.D. (1947). Essays in the Theory of Economic Growth. *The American Economic Review*. Vol. 37. No. 1
- Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrod R. F. (1939). An essay in dynamic economics. *Economic Journal*.
- Irawan & Suparmoko. (1992). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Levine, R dan D. Renelt. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regretion. *The American Economic Review* 82 (4): 942-963.
- Lusiana. (2012). *Usaha penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pasaribu, R. B. F. (2013). Pembangunan Diatas Pijakan Rapuh. *Jurnal Proyeksi Ekonomi Indonesia 2013*: INDEF
- Perka BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Panduan Penuyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Sakti, N.C.. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukirno. (1994). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE UI.
- Suparmoko, M. (2002). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Tambunan, Tulus, 2006, Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi. *Artikel dalam [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)* diakses 12 September 2020.
- Tarigan, R. (2012). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M. P, dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga,
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPF E.
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF E.
- Domar, E.D. (1947). Essays in the Theory of Economic Growth. *The American Economic Review*. Vol. 37. No. 1
- Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrod R. F. (1939). An essay in dynamic economics. *Economic Journal*.
- Irawan & Suparmoko. (1992). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPF E.
- Kuncoro, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Levine, R dan D. Renelt. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regretion. *The American Economic Review* 82 (4): 942-963.
- Lusiana. (2012). *Usaha penanaman Modal di Indonesia*. Jakarata: Rajawali Pers.
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Ed.4, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pasaribu, R. B. F. (2013). Pembangunan Diatas Pijakan Rapuh. *Jurnal Proyeksi Ekonomi Indonesia 2013*: INDEF
- Perka BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Panduan Penuyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Sakti, N.C.. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukirno. (1994). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE UI.
- Suparmoko, M. (2002). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPF E.
- Tambunan, Tulus, 2006, Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi. *Artikel dalam [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)* diakses 12 September 2020.
- Tarigan, R. (2012). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, M. P, dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga,
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan MT. Haryono No. 4 Telp. (0517) 31508 Fax. (0517) 32241

RANTAU

Kode Pos : 71114

Nomor : 002/164-Litbang/Bappelitbang/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Tenaga Ahli**

Rantau, 24 Agustus 2020

Kepada Yth.  
Ketua LPPM Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Kajian Potensi Investasi Daerah Kabupaten Tahun 2020 yang bersumber dari APBDP TA 2020 pada program Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini kami menyampaikan permintaan tenaga ahli sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama : Prof. Dr. Ahmad Alim Bachry, SE., M.Si  
Tenaga Ahli : Ekonomi Bisnis dan Manajemen Strategis
2. Nama : M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si  
Tenaga Ahli : Perekonomian dan Pembangunan
3. Nama : Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA  
Tenaga Ahli : Akuntansi Publik dan Investasi
4. Nama : Doni Stiadi, S.Si., M.Si  
Tenaga Ahli : Statistik dan Ekonomi Keuangan
5. Nama : Dr. Nuril Huda, SE., MM  
Tenaga Ahli : Statistik dan Ekonomi Keuangan
6. Nama : Dr. Siswanto Rawali, S.Si., M.Si  
Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Komunikasi Kebijakan Publik
7. Nama : Ismar Hawid, S.Si., M.Si  
Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Bappelitbang

H. ZAINAL AQLI, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690214 199403 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : (0511) 3305240

Laman : <http://lppm.ulm.ac.id>

Nomor : **830** /UN8.2/PG/2020  
Perihal : Penunjukan Tenaga Ahli

8 September 2020

Yth. Kepala Bappelitbang  
Pemerintah Kabupaten Tapin  
Rantau

Menindaklanjuti surat Kepala Bappelitbang Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor: 002/164-Litbang/Bappelitbang/2020, tanggal 24 Agustus 2020, perihal Permohonan Tenaga Ahli, maka dengan ini kami menunjuk Tenaga Ahli untuk kegiatan "Kajian Potensi Investasi Daerah Kabupaten Tahun 2020" sebagai berikut :

No.	Nama	Bidang Keahlian
1.	Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si	Ekonomi Bisnis dan Manajemen Strategis
2.	M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si	Perekonomian dan Pembangunan
3.	Dr. Kadir, Drs., M.Si., Ak., CA	Akuntansi Publik dan Investasi
4.	Doni Stiadi, S.Si., M.Si	Statistik dan Ekonomi Keuangan
5.	Dr. Nuril Huda, SE., M.Si	Statistik dan Ekonomi Keuangan
6.	Dr. Siswanto Rawali, S.Si., M.Si	Komunikasi Kebijakan Publik
7.	Ismar Hawid, S.Si., M.Si	Pemberdayaan Masyarakat

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.



Ketua,

Dadang Biyatmoko

NIP 196805071993031020

Tembusan:

1. Rektor ULM (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM